



Laporan Keuangan

Dinas Pertanian



KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunianya sehingga dapat diselesaikannya Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Balangan Tahun 2019. Laporan Keuangan merupakan salah satu dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang harus dibuat oleh setiap SKPD.

Laporan Keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Balangan tahun 2019 merupakan hasil pelaksanaan anggaran yang berada di SKPD Dinas Pertanian yang telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai serta Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Akhir kata semoga Laporan Keuangan ini dapat dijadikan bahan dalam laporan pertanggungjawaban APBD Tahun 2019.

Paringin, Desember 2019

Kepala Dinas Pertanian

RAHMADI, S.Pt.,MS

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19630908 198711 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

DINAS PERTANIAN

Jl. Jenderal A. Yani Km 4,5 Kec. Paringin Selatan 71662 Telp/Fax. (0526)2029499

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan **Dinas Pertanian** Pemerintah Kabupaten Balangan yang terdiri dari (a) *Laporan Realisasi Anggaran*, (b) *Neraca*, (c) *Laporan Perubahan Ekuitas*, (d) *Laporan Operasional* dan (e) *Catatan Atas Laporan Keuangan* Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, Posisi Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Secara Layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Paringin, Desember 2019

Pengguna Anggaran

RAHMADI, S.Pt.,MS

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19630908 198711 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PERTANIAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah sebagai entitas akuntansi merupakan salah satu bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD sekaligus sebagai sarana untuk menyajikan atau menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan baik aspek pendapatan, belanja, beban, aset, kewajiban maupun ekuitas SKPD yang akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan selama satu periode tahun 2019. Laporan keuangan tersebut harus merupakan satu kesatuan yang terdiri dari laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan yang harus disajikan bersama-sama.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.

Maksud penyusunan laporan keuangan adalah untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah. Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan meliputi tujuan umum dan tujuan khusus dengan uraian sebagai berikut:

1. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas akuntansi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
2. Tujuan khusus (spesifik) laporan keuangan SKPD adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan

untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas SKPD;
- b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas SKPD;
- c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f) menyediakan informasi mengenai potensi SKPD untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah;
- g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas akuntansi dalam mendanai aktivitasnya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia nomor 4286) ;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia nomor 4355) ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 5165);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah daerah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 20..;
 8. Peraturan Bupati Balangan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
 9. Peraturan Bupati Balangan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN.

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan laporan Keuangan SKPD
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD



BAB II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

- 2.1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD
- 2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

BAB III. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

- 3.1. Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan
 - 3.1.1. Pendapatan – LRA
 - 3.1.2. Belanja
 - 3.1.3. Pendapatan – LO
 - 3.1.4. Beban
 - 3.1.5. Aset
 - 3.1.6. Kewajiban
 - 3.1.7. Ekuitas
- 3.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi yang rnenggunakan basis akrual pada Pemerintah Daerah.

BAB IV. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB V. PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.

Pencapaian kinerja keuangan Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Balangan pada Tahun Anggaran 2019 dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Daerah sebesar **Rp. 53.566.331.985,-** dibandingkan anggaran sebesar **Rp. 56.577.878.372,-** Atau Terealisasi sebesar 94,68%. Dari Anggaran tersebut diatas bersumber dari APBD Sebesar Rp.56.577.878.372,- dan DAK Rp. 470.765.770,- belanja daerah ini berasal dari :
 - a. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 52.066.583.985,- dibandingkan anggaran sebesar Rp. 55.577.878.372,- atau terealisasi sebesar % yang terdiri dari :
 - 1). Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 9.678.798.495,- dibandingkan anggaran sebesar Rp. 8.741.451.616,- atau terealisasi sebesar 90,32%.
 - 2). Realisasi Belanja Barang sebesar Rp. 13.771.827.394,- dibandingkan anggaran sebesar Rp. 15.149.645.532,- atau terealisasi sebesar 90,91%.
 - 3). Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.0,00 dibandingkan anggaran Rp.0,00 terealisasi sebesar 0%
 - b. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 1.499.748.000,- dibandingkan anggaran sebesar Rp. 1.541.500.000,- atau terealisasi sebesar 97,29%, terdiri dari :
 - 1). Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp. 0,- dibandingkan anggaran sebesar Rp. 0,- atau terealisasi sebesar 0%.

- 2). Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 429.895.000 dibandingkan anggaran sebesar Rp. 448.250.000 atau terealisasi sebesar 95,91%.
- 3). Realisasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebesar Rp. 773.310.000,- dibandingkan anggaran sebesar Rp. 793.050.000 atau terealisasi sebesar 97,51%.
- 4). Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 167.700.000,- dibandingkan anggaran sebesar Rp. 170.200.000,- atau terealisasi sebesar 98,53%.
- 5). Realisasi Belanja Aset Lainnya sebesar Rp. 128.843.000,- dibandingkan anggaran sebesar Rp. 130.000.000,- atau terealisasi sebesar 99,11%.

Data Anggaran dan Realisasi APBD Dinas Pertanian Kabupaten Balangan untuk tahun anggaran 2019 adalah tersaji sebagai berikut :

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
			KEUANGAN (Rp.)	%
3.03 .1 . 01	Belanja Tidak Langsung			
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4,499,986,968.00	4,406,510,350.00	97.92
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	487,589,066.00	411,098,270.00	84.31
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	331,733,500.00	245,850,000.00	74.11
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	458,414,000.00	375,354,000.00	81.88
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	123,259,500.00	97,596,000.00	79.18
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	281,047,536.00	231,671,580.00	82.43
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	317,761,925.00	17,244,211.00	5.43
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	200,000.00	73,705.00	36.85
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan bagi PNS Daerah	2,557,650,000.00	2,540,303,500.00	99.32
5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan Uang Makan Harian PNS	621,156,000.00	415,750,000.00	66.93
3.03 . 3.03.1 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
3.03 . 3.03.1 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	300,000.00	183,000.00	61.00
3.03 . 3.03.1 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	231,771,500.00	222,693,688.00	96.08
3.03 . 3.03.1 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	368,000,000.00	228,200,000.00	62.01
3.03 . 3.03.1 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	171,550,000.00	170,984,000.00	99.67



3.03 . 3.03.1 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	208,513,300.00	190,051,600.00	91.15
3.03 . 3.03.1 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	68,242,000.00	51,500,150.00	75.47
3.03 . 3.03.1 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	74,350,000.00	65,535,000.00	88.14
3.03 . 3.03.1 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	17,200,000.00	15,350,000.00	89.24
3.03 . 3.03.1 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	24,696,000.00	20,400,000.00	82.60
3.03 . 3.03.1 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	88,800,000.00	62,687,000.00	70.59
3.03 . 3.03.1 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	763,420,000.00	757,140,215.00	99.18
3.03 . 3.03.1 . 01 . 20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	26,221,028.00	26,150,000.00	99.73
3.03 . 3.03.1 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
3.03 . 3.03.1 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	110,000,000.00	102,930,000.00	93.57
3.03 . 3.03.1 . 02 . 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	0.00	0.00	0.00
3.03 . 3.03.1 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	105,800,000.00	99,580,000.00	94.12
3.03 . 3.03.1 . 02 . 14	Pengadaan Komputer	162,107,000.00	157,645,000.00	97.25
3.03 . 3.03.1 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	437,400,000.00	422,290,000.00	96.55
3.03 . 3.03.1 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	537,200,000.00	386,983,700.00	72.04
3.03 . 3.03.1 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	90,465,000.00	72,327,000.00	79.95
3.03 . 3.03.1 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			
3.03 . 3.03.1 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	120,800,000.00	117,752,000.00	97.48
3.03 . 3.03.1 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	122,300,000.00	119,259,000.00	97.51
3.03 . 3.03.1 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
3.03 . 3.03.1 . 05 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	238,520,000.00	187,400,000.00	78.57
3.03 . 3.03.1 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
3.03 . 3.03.1 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	611,540,000.00	598,603,850.00	97.88
3.03 . 3.03.1 . 06 . 04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	12,500,000.00	12,500,000.00	100.00
3.03 . 3.03.1 . 06 . 05	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	25,200,000.00	25,184,000.00	99.94
3.03 . 3.03.1 . 06 . 08	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00



3.03 . 3.03.1 . 20	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak			
3.03 . 3.03.1 . 20 . 02	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	330,240,000.00	324,100,000.00	98.14
3.03 . 3.03.1 . 20 . 08	Pelayanan Kesehatan Hewan	283,897,223.00	272,205,100.00	95.88
3.03 . 3.03.1 . 21	Program peningkatan produksi hasil peternakan			
3.03 . 3.03.1 . 21 . 01	Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak	8,638,350,000.00	8,551,510,300.00	98.99
3.03 . 3.03.1 . 21 . 02	Pembibitan dan perawatan ternak	170,040,000.00	165,401,238.00	97.27
3.03 . 3.03.1 . 21 . 03	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	6,893,846,631.00	6,695,943,549.00	97.13
3.03 . 3.03.1 . 21 . 04	Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat	206,310,000.00	193,793,840.00	93.93
3.03 . 3.03.1 . 21 . 18	Pembinaan Sentra Kawasan dan Pembibitan Peternakan	461,734,900.00	431,735,250.00	93.50
3.03 . 3.03.1 . 22	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan			
3.03 . 3.03.1 . 22 . 07	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	164,836,000.00	152,258,400.00	92.37
3.03 . 3.03.1 . 22 . 08	Pasca panen dan pengolahan hasil peternakan	124,874,000.00	115,930,140.00	92.84
3.03 . 3.03.1 . 22 . 09	Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil peternakan yang di pasarkan	37,920,000.00	35,173,800.00	92.76
3.03 . 3.03.1 . 31	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura			
3.03 . 3.03.1 . 31 . 01	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	268,426,000.00	233,028,700.00	86.81
3.03 . 3.03.1 . 31 . 02	Promosi atas hasil produksi hortikultura unggul daerah	649,395,000.00	485,777,099.00	74.80
3.03 . 3.03.1 . 33	Program Peningkatan Produktivitas Perkebunan			
3.03 . 3.03.1 . 33 . 01	Penyediaan sarana produksi perkebunan	1,458,558,000.00	1,354,716,400.00	92.88
3.03 . 3.03.1 . 33 . 02	Pengembangan bibit unggul perkebunan	370,880,000.00	353,689,700.00	95.36
3.03 . 3.03.1 . 33 . 03	Pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan	621,830,000.00	582,986,600.00	93.75
3.03 . 3.03.1 . 34	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian			
3.03 . 3.03.1 . 34 . 01	Penyediaan sarana produksi pertanian	4,126,805,000.00	4,075,153,939.00	98.75
3.03 . 3.03.1 . 34 . 02	Penyediaan prasarana	5,973,476,000.00	5,865,415,641.00	98.19



	produksi pertanian			
3.03 . 3.03.1 . 34 . 03	Kegiatan Penyediaan sarana produksi pertanian (DAK)	470,765,770.00	467,370,000.00	99.28
3.03 . 3.03.1 . 35	Pengembangan Produksi Benih Padi Yang Berlabel dan Bersertifikat			
3.03 . 3.03.1 . 35 . 01	Pengembangan perbenihan/perbibitan	520,000,000.00	506,256,000.00	97.36
3.03 . 3.03.1 . 36	Program Peningkatan Produksi Hortikultura			
3.03 . 3.03.1 . 36 . 01	Kegiatan Produksi Hortikultura	1,826,709,000.00	1,789,201,237.00	97.95
3.03 . 3.03.1 . 36 . 02	Pembenihan Tanaman Hortikultura	180,680,000.00	156,172,100.00	86.44
3.03 . 3.03.1 . 36 . 03	Perlindungan Tanaman Hortikultura	261,390,000.00	249,888,100.00	95.60
3.03 . 3.03.1 . 37	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan			
3.03 . 3.03.1 . 37 . 01	Pelatihan penerapan teknologi pertanian modern bercocok tanam	1,309,461,650.00	1,196,292,401.00	91.36
3.03 . 3.03.1 . 37 . 02	Pengembangan padi sawah	1,531,558,800.00	1,414,318,225.00	92.35
3.03 . 3.03.1 . 37 . 03	Pengembangan Palawija	592,067,500.00	565,242,179.00	95.47
3.03 . 3.03.1 . 37 . 04	Penerapan PHT tanaman pangan demi peningkatan produksi tanaman pangan	248,878,025.00	247,204,158.00	99.33
3.03 . 3.03.1 . 37 . 05	Penekanan luasan kejadian OPT tanaman pangan	225,440,000.00	213,993,143.00	94.92
3.03 . 3.03.1 . 37 . 06	Pembinaan penangkaran tanaman pangan	119,908,750.00	105,739,005.00	88.18
3.03 . 3.03.1 . 37 . 07	Penyediaan benih unggul tanaman pangan	345,808,800.00	313,438,909.00	90.64
3.03 . 3.03.1 . 38	Program Peningkatan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan			
3.03 . 3.03.1 . 38 . 01	Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian yang akan dipasarkan	249,175,200.00	230,035,200.00	92.32
3.03 . 3.03.1 . 38 . 02	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian tepat guna	539,633,300.00	441,444,879.00	81.80
3.03 . 3.03.1 . 39	Program Peningkatan Produktifitas Penyuluh Pertanian			
3.03 . 3.03.1 . 39 . 01	Peningkatan kapasitas tenaga Penyuluh Pertanian	82,890,000.00	79,840,678.00	96.32
3.03 . 3.03.1 . 39 . 03	Penyusunan Program Penyuluh Pertanian	136,345,000.00	135,049,356.00	99.05
3.03 . 3.03.1 . 39 . 04	Peningkatan pengetahuan penerapan teknologi tepat guna bagi penyuluh	12,538,000.00	10,413,000.00	83.05
3.03 . 3.03.1 . 39 . 05	Pelaksanaan Kegiatan Pada BPP dan Penyuluh Pertanian	589,878,000.00	567,278,000.00	96.17

3.03 . 3.03.1 . 40	Program Peningkatan Produktifitas Kelembagaan Petani			
3.03 . 3.03.1 . 40 . 01	Peningkatan kapasitas SDM Petani	43,440,000.00	35,260,000.00	81.17
3.03 . 3.03.1 . 41	Program Peningkatan Pengolahan Hasil Perkebunan			
3.03 . 3.03.1 . 41 . 01	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi perkebunan tepat guna	1,805,225,000.00	1,765,307,800.00	97.79
3.03 . 3.03.1 . 41 . 02	Promosi atas hasil produksi perkebunan unggul daerah	267,042,500.00	199,398,300.00	74.67
3.03 . 3.03.1 . 41 . 03	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi perkebunan tepat guna	134,430,000.00	126,088,800.00	93.80
TOTAL		56,577,878,372.00	53,566,331,985.00	94.68

2.2. Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan.

1) Permasalahan : Tidak tercapainya target indikator kinerja Persentase pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan jalan pada jalan kabupaten dimana salah satu penyumbang capaian kinerja ini adalah pengadaan PJU yang membutuhkan anggaran cukup besar sedangkan yang banyak dilaksanakan hanya melakukan perbaikan/pemeliharaan PJU yang tidak diakomodir dalam tolak ukur kinerja.

Solusi : Merubah indikator kinerja untuk penyusunan Renstra SKPD periode berikutnya.



BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

RINCIAN DARI PENJELASAN MASING-MASING POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

3.1. PENDAPATAN - LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Uraian	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
1. PENDAPATAN - LRA	0,00	0,00	(0,00)	196.050.000,-

Jumlah Pendapatan – LRA daerah sebesar Rp. 0,- merupakan realisasi pendapatan dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Pendapatan tersebut terinci ke dalam :

Uraian	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
a. Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	(0,00)	196.050.000,-

Merupakan realisasi atas pendapatan daerah dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

3.1.1.1 pendapatan asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

Uraian	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
1). Pajak Daerah	0,00	0,00	(0,00)	0,00

Merupakan realisasi atas pendapatan daerah dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Terdiri dari :

Uraian	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
a). Pajak Hotel	0,00	0,00	(0,00)	0,00
b). Pajak Restoran	0,00	0,00	(0,00)	0,00
c). Pajak Hiburan	0,00	0,00	(0,00)	0,00
d). Pajak Reklame	0,00	0,00	(0,00)	0,00
e). Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	(0,00)	0,00
f). Pajak Parkir	0,00	0,00	(0,00)	0,00



Uraian	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2). Lain-lain PAD Yang Sah	0,00	0,00	(0,00)	196.050.000,-

Merupakan realisasi pendapatan dari Lain-lain PAD (Penjualan Ternak) yang sah dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Retribusi Daerah terdiri dari :

3.1.2. Belanja

Uraian	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja	56.577.878.372,-	53.566.331.985,-	(3.011.546.387,-)	59.893.303.879,-

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja daerah periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, meliputi :

3.1.2.1. Belanja Operasi

Uraian	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Operasi	55.036.378.372,-	52.066.583.985,-	(2.969.794.387,-)	57.356.862.879,-

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja operasi periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Terdiri dari :

3.1.2.1. 1. Belanja Pegawai

Uraian	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	10.505.198.495,-	6.408.598.116,-	(917.794.379,-)	9.488.978.805,-



Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja modal periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

3.1.2.1. 2. Belanja Barang dan Jasa

Uraian	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Belanja Barang dan Jasa	44.531.179.877,-	42.701.932.369,-	(1.829.247.508,-)	47.867.884.074,-

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja modal periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

3.1.2.1. 3. Belanja Bantuan Sosial

Uraian	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	(0,00)	9.000.000,-

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja modal periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

3.1.2.2. Belanja Modal

Uraian	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Modal	1.541.500.000,-	1.499.748.000,-	(41.752.000,-)	2.536.441.000,-

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja modal periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Terdiri dari:



3.1.2.2. 1. Belanja Modal Tanah

Uraian	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Tanah	0,00	0,00	(0,00)	0,00

Untuk Belanja Modal Tanah tidak ada Penambahan pada periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019

3.1.2.2. 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Peralatan dan Mesin	448.250.000,-	429.895.000,-	(18.355.000,-)	760.441.000,-

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja Modal Peralatan dan Mesin periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

3.1.2.2. 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Uraian	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	793.050.000,-	773.310.000,-	(19.740.000,-)	1.691.227.000,-

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja Modal Gedung dan Bangunan periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.



3.1.2.2. 4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	170.200.000,-	167.700.000,-	(2.500.000,-)	84.803.000,-

untuk Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak ada Penambahan pada periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019

3.1.2.2. 5. Belanja Aset Tetap lainnya

Uraian	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Aset Tetap lainnya	130.000.000,-	128.843.000,-	(1.157.000,-)	0,00,

Untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Juga tidak ada Penambahan pada periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

3.1.2.3. Belanja Tak Terduga

Uraian	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	(0,00)	0,00,

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja modal periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.



3.2. NERACA.

3.2.1. ASET	<u>Tahun 2019 (Rp)</u>	<u>Tahun 2018 (Rp)</u>
	0,00	0,00

3.2.1.1 Aset Lancar .

	<u>Tahun 2019 (Rp)</u>	<u>Tahun 2018 (Rp)</u>
1. Kas	0,00	0,00
a). Kas di Bendahara Pengeluaran	<u>Tahun 2019 (Rp)</u> 0,00	<u>Tahun 2018 (Rp)</u> 0,00

Semua Sisa Uang Persediaan sudah disetorkan oleh bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah Sebelum tanggal 31 Desember 2019.

	<u>Tahun 2019 (Rp)</u>	<u>Tahun 2018 (Rp)</u>
b). Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

Semua Hasil dari Pendapatan sudah disetorkan oleh bendahara Penerimaan ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2019

	<u>Tahun 2019 (Rp)</u>	<u>Tahun 2018 (Rp)</u>
2. Piutang	0,00	0,00
3. Persediaan	<u>Tahun 2019 (Rp)</u> 1.435.776.273,-	<u>Tahun 2018 (Rp)</u> 1.342.563.140,-

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang masih berada di SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Balangan yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Balangan, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.



Saldo persediaan per 31 Desember 2019 pada Neraca SKPD sebesar **Rp. 1.435.776.273,-**.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan fisik persediaan akhir tahun 2019 oleh Inspektorat Kabupaten Balangan pada tanggal 28 Januari 2020 terdapat nilai persediaan sebesar Rp. **1.435.776.273,-**

3.2.1.2 ASET TETAP

	<u>Tahun 2019 (Rp)</u>	<u>Tahun 2018 (Rp)</u>
1. Tanah	7.916.241.000	8.044.841.000,-

Merupakan saldo tanah per 31 Desember 2019, Tidak Ada Pengadaan maupun mutasi tanah Pada Tahun Anggaran 2019.

	<u>Tahun 2019 (Rp)</u>	<u>Tahun 2018 (Rp)</u>
2. Peralatan dan Mesin	10.140.120.430,-	9.742.933.930,-

Merupakan saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2019. Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 10.140.120.430,-

	<u>Tahun 2019 (Rp)</u>	<u>Tahun 2018 (Rp)</u>
3. Gedung dan Bangunan	28.543.048.657,-	28.027.124.459,-

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 28.543.048.657,- Pada Tahun 2018 Rp. 28.027.124.459,-



	<u>Tahun 2019(Rp)</u>	<u>Tahun 2018(Rp)</u>
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.592.836.313,-	7.804.506.313,-

Merupakan saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 2018. Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 7.592.836.313,-

	<u>Tahun 2019(Rp)</u>	<u>Tahun 2018(Rp)</u>
5. Aset Tetap Lainnya	65.983.000,-	65.983.000,-

Merupakan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 65.983.000,-

3.4.2. EKUITAS AKHIR	<u>Tahun 2019(Rp)</u>	<u>Tahun 2018(Rp)</u>
	30.667.601.094,-	33.046.188.702,-

Jumlah tersebut merupakan saldo akhir Ekuitas berdasarkan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)
1)	Kewajiban	(230.682.800,-)	0,-	(230.682.800,-)
2)	Ekuitas Dana	30.667.601.094,-	33.046.188.702,-	(2.378.587.608,-)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		30.898.283.894,-	33.046.188.702,-	(2.147.904.808,-)



3.3 PENDAPATAN - LO

A. LAPORAN OPERASIONAL

Uraian	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
1. PENDAPATAN - LO	0,-	0,-	0,-	196.050.000,-

Jumlah pendapatan – LO Dinas Pertanian Kabupaten Balangan tahun 2019 sebesar Rp. 0,- yang merupakan jumlah semua pendapatan yang memang dibebankan pada tahun Anggaran 2019.

Uraian	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
a. Pendapatan Asli Daerah	0,-	0,-	0,-	196.050.000,-

Merupakan realisasi atas pendapatan daerah dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

uraian	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2). Hasil Retribusi Daerah	0,0	0,-	0,-	0,-

Merupakan realisasi pendapatan dari retribusi daerah dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 Retribusi Daerah terdiri dari :

Uraian	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
a. Retribusi Jasa Umum	0,-	0,-	0,-	0,-

3.3.1. BEBAN

Uraian	2019 (Realisasi)	2018 (Realisasi)
Beban	55.462.102.714,-	61.606.755.170,-



Jumlah tersebut merupakan realisasi beban daerah periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, meliputi :

A. Beban Pegawai- LO

Uraian	2019 (Realisasi)	2018 (Realisasi)
Beban Pegawai - LO	8.968.901.616,-	8.565.828.805,-

Jumlah tersebut merupakan realisasi beban Pegawai periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 Sebesar Rp. 8.968.901.616,-

Beban Persediaan

Uraian	2019 (Realisasi)	2018 (Realisasi)
Beban Persediaan	1.813.681.467,-	3.389.022.052,-

Jumlah tersebut merupakan realisasi beban persediaan periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 Sebesar Rp. 1.813.681.467,-

B. Beban Barang

Uraian	2019 (Realisasi)	2018 (Realisasi)
Beban Barang	1.603.810.400,-	1.617.510.800,-

Jumlah tersebut merupakan realisasi beban barang periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 Sebesar Rp. 1.603.810.400,-

C. Beban Jasa

Uraian	2019 (Realisasi)	2018 (Realisasi)
Beban Jasa	5.135.240.488,-	5.314.358.080,-



Jumlah tersebut merupakan realisasi beban jasa periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 Sebesar Rp. 5.135.240.488,-

D. Beban Pemeliharaan

Uraian	2019 (Realisasi)	2018 (Realisasi)
Beban Pemeliharaan	403.763.700,-	539.181.094,-

Jumlah tersebut merupakan realisasi beban pemeliharaan periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 Sebesar Rp. 403.763.700,-

E. Beban Perjalanan Dinas

Uraian	2019 (Realisasi)	2018 (Realisasi)
Beban Perjalanan Dinas	4.725.351.006,-	4.819.748.610,-

Jumlah tersebut merupakan realisasi beban perjalanan dinas periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 Sebesar Rp. 4.725.351.006,-

F. Beban Bunga

Uraian	2019 (Realisasi)	2018 (Realisasi)
Beban Bungan	0,-	0,-

Jumlah tersebut merupakan realisasi beban bunga periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 Sebesar Rp. 0,-

G. Beban Subsidi

Uraian	2019 (Realisasi)	2018 (Realisasi)
Beban Subsidi	0,-	0,-



Jumlah tersebut merupakan realisasi beban subsidi periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 Sebesar Rp. 0,-

H. Beban Hibah

Uraian	2019 (Realisasi)	2018 (Realisasi)
Beban Hibah	29.553.304.975,-	33.767.138.750,-

Jumlah tersebut merupakan realisasi beban hibah periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 Sebesar Rp. 29.553.304.975,-

I. Beban Bantuan Sosial

Uraian	2019 (Realisasi)	2018 (Realisasi)
Beban Barang	0,-	9.000.000,-

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja Bantuan sosial periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 Sebesar Rp. 0,-

J. Beban Penyusutan dan Amortasi

Uraian	2019 (Realisasi)	2018 (Realisasi)
Beban Penyusutan dan Amortasi	3.257.844.062,-	3.494.741.979,-

Jumlah tersebut merupakan realisasi beban penyusutan dan amortasi periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 Sebesar Rp. 3.257.844.062,-

K. Beban Penyisihan Piutang

Uraian	2019 (Realisasi)	2018 (Realisasi)
Beban Penyisihan Piutang	0,-	0,-



Jumlah tersebut merupakan realisasi beban penyisihan piutang periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 Sebesar Rp. 0,-

L. Beban Lain-lain

Uraian	2019 (Realisasi)	2018 (Realisasi)
Beban Lain-lain	205.000,-	90.225.000,-

Jumlah tersebut merupakan realisasi beban lain-lain periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 Sebesar Rp. 205.000,-

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

A. TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 29 tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur – Unsur Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perkebunan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Struktur Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :

Unsur – unsur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Balangan terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Pelaporan & Keuangan
3. Bidang Tanaman Pangan
 - a. Seksi Perbenihan dan Produksi Tanaman Pangan
 - b. Seksi Sarana Prasarana dan Perlindungan Tanaman Pangan
 - c. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
4. Bidang Hortikultura
 - a. Seksi Perbenihan dan Produksi Hortikultura
 - b. Seksi Sarana Prasarana dan Perlindungan Hortikultura
 - c. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Hortikultura
5. Bidang Peternakan
 - a. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
 - c. Seksi Produksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan
6. Bidang Perkebunan

- a. Seksi Produksi Perkebunan
 - b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
 - c. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan
7. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
- a. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat Dan Mesin
 - b. Seksi Lahan, Irigasi Dan Pembiayaan
 - c. Seksi Kelembagaan Dan Sarana Penyuluhan.

❖ Tugas Pokok dan Uraian Tugas

Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perkebunan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Uraian tugas Dinas Pertanian adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perkebunan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perkebunan;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang tanaman pangan;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang hortikultura;
- e. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang peternakan;
- f. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang perkebunan;
- g. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemberian perizinan dan pelayanan umum;
- h. mengoordinasikan pelayanan administrasi dan mengelola urusan kesekretariatan;
- i. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan

- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

❖ **Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan penyusunan program, pelaporan, urusan umum, kepegawaian dan keuangan lingkup Dinas Pertanian.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data;
- b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan serta laporan;
- c. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan rencana anggaran;
- d. menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- e. menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan urusan ketatausahaan; menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- f. menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Sekretariat terdiri dari :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Sub Bagian Pelaporan dan Keuangan.

❖ Bidang Tanaman Pangan

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengembangan tanaman pangan. Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- a. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan perbenihan dan produksi tanaman pangan;
- b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan sarana prasarana dan perlindungan tanaman pangan;
- c. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan; dan
- d. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Bidang Tanaman Pangan terdiri dari :

- Seksi Perbenihan dan Produksi Tanaman Pangan;
- Seksi Sarana Prasarana dan Perlindungan Tanaman Pangan; dan
- Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.

❖ Bidang Hortikultura

Bidang Hortikultura mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengembangan tanaman hortikultura. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perbenihan dan produksi tanaman hortikultura;
- b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sarana prasarana dan perlindungan tanaman hortikultura;

- c. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman hortikultura; dan
- d. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Bidang Hortikultura terdiri dari :

- o Seksi Pembenihan dan Produksi Hortikultura;
- o Seksi Sarana Prasarana dan Perlindungan Hortikultura; dan
- o Seksi Pascapanen dan Pengolahan Hasil Hortikultura.

❖ Bidang Peternakan

Bidang Peternakan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengembangan peternakan. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pemeliharaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang penyebaran dan pengembangan peternakan;
- c. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana prasarana dan pembinaan usaha peternakan; dan
- d. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Bidang Peternakan terdiri dari :

- o Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- o Seksi Pengolahan dan Pemasara Hasil Peternakan
- o Seksi Produksi Penyebarab dan Pengembangan Peternakan

❖ Bidang Perkebunan

Bidang Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengembangan perkebunan.

mempunyai tugas melaksanakan pengembangan produksi dan usaha perkebunan, merencanakan melaksanakan pembinaan dalam upaya peningkatan produksi melalui perluasan, intensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi tanaman perkebunan, pembinaan dan bimbingan teknis pengolahan hasil dan pemasaran hasil komoditi perkebunan serta pelaksanaan perlindungan perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan bimbingan usaha, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan ;
- b. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan produksi dan aneka usaha tani perkebunan ;
- c. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan perlindungan perkebunan ;
- d. melaksanakan kerjasama dengan bidang – bidang lain dan instansi terkait dalam melaksanakan kegiatan;
- e. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya ;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung;

Bidang Perkebunan terdiri dari :

- o Seksi Produksi Perkebunan
- o Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
- o Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan

❖ Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

Bidang Peternakan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengembangan peternakan. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- e. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pemeliharaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang penyebaran dan pengembangan peternakan;
- g. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana prasarana dan pembinaan usaha peternakan; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Bidang Peternakan terdiri dari :

- o Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan
- o Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin
- o Seksi Kelembagaan dan Sarana Penyuluhan

❖ Unit Pelaksana Teknis

UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional (kegiatan teknis yang secara langsung berhubung dengan pelayanan masyarakat) dan/atau kegiatan teknis penunjang (kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas) pada Dinas Pertanian yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

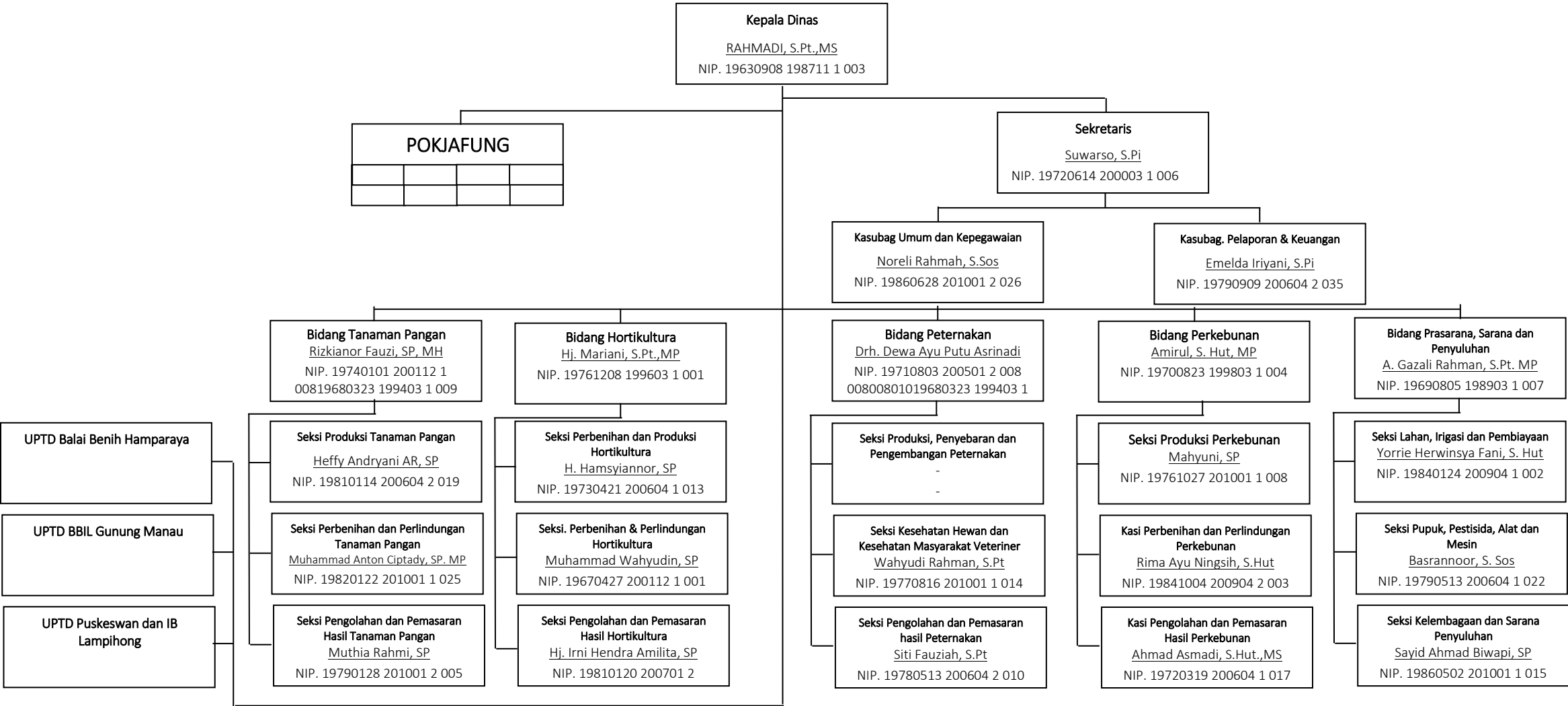
UPT mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang serta pengelolaan urusan ketatausahaan pada UPT. UPT dipimpin seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPT terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional yang dapat ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

❖ Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pertanian sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN KABUPATEN BALANGAN
PERDA KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN**



B. SUMBER DAYA SOPD

1. Sumber Daya Manusia

Pemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Good governance digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Balangan berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sampai Bulan Januari 2018 berjumlah 97 orang. Kondisi Kepegawaian Dinas Pertanian Kabupaten Balangan dapat dilihat pada tabel 2.1, 2.2 dan 2.3 berikut :

Tabel 2.1

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Golongan dan Esselon Jabatan

JLH (ORG)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JLH (ORG)	GOL	JLH (ORG)	ESS	JLH (ORG)
93	SD	-	I/a	-	II A	-
	SLTP	4	I/b	-	III A	2
	SLTA	24	I/c	-	III B	5
	D1	-	I/d	-	IV A	14
	D2	-	II/a	14	IV B	2
	D3	11	II/b	1		
	D4	7	II/c	6		
	S1	41	II/d	3		

	S2	6	III/a	28		
	S3	-	III/b	3		
			III/c	-		
			III/d	12		
			IV/a	10		
			IV/b	16		
			IV/c	-		

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanian

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.1. tingkat pendidikan karyawan Dinas Pertanian Kabupaten Balangan yang paling banyak adalah pendidikan S1 sebanyak 43 orang (32,65%), jumlah karyawan yang menamatkan pendidikan S2 tercatat sebanyak 7 orang dan paling banyak kedua yaitu SLTA sebanyak 22 orang yang secara prosentase, jumlah tersebut mencapai 26,53 % dari seluruh karyawan Dinas Pertanian Kabupaten Balangan D IV sebanyak 7 orang, D III sebanyak 11 orang dan SLTP sebanyak 7 orang. Tingkat pendidikan bagian terbesar dari karyawan Dinas Pertanian Kabupaten Balangan ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja dan menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Balangan.

Tabel 2.2

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Per Bidang

No	Uraian	Tingkat Pendidikan						Jlh
		S2	S1	D IV	D III	SLTA	SLTP	
1	Kepala Dinas	1	-	-				1
2	Sekretariat		3	-	1	3	1	8
3	Bidang Tanaman Pangan	2	2	-	-	2	-	6
4	Bidang Hortikultura	1	3	-	1	-	1	6
5	Bidang Peternakan		3	1	7	1		12
6	Bidang Perkebunan	1	5	-	-	1	-	7
7	Bidang PSP	1	3	-	-	1	-	5
8	UPT. Hamparaya	-	1	-	-	1	1	3
9	UPT. Puskeswan	-	1	-	-	-	-	1
10	KJF/BPP	-	20	6	2	15	1	44
Jumlah		6	41	7	11	24	4	93

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DISTAN

Tabel 2.3

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan Per Bidang

No	Uraian	Tingkat Pendidikan						Jlh
		Ess II a	Ess III a	Ess III b	Ess IV a	Ess IV b	Staf	
1	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	1	-	2	-	4	7
3	Bidang Tanaman Pangan	-	-	1	3	-	2	6
4	Bidang Hortikultura	-	-	1	2	-	3	6
5	Bidang Peternakan	-	-	1	2	-	10	13
6	Bidang Perkebunan	-	-	1	3	-	4	8
7	Bidang PSP	-	-	1	2	-	2	5
8	UPT. Hamparaya	-	-	-	-	1	2	3
9	UPT. Puskesmas	-	-	-	-	1	-	1
10	KJF/BPP	-	-	-	-	-	43	43
Jumlah		-	2	5	14	2	70	93

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DISTAN

Kendala dalam ketersediaan SDM yang menjadi isu strategis di Dinas Pertanian Kabupaten Balangan adalah mengenai kualitas dan kuantitas pejabat struktural maupun fungsional yang masih dirasa sangat kurang dan ini tentunya juga akan mempengaruhi lancarnya pencapaian target kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Balangan.

2. Anggaran

Dari sisi anggaran, Dinas Pertanian Kabupaten Balangan mendapatkan alokasi anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun, tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran 2015 - 2019 beserta serapannya pada tabel 2.4 , 2.5 dan 2.6 berikut ini :

Tabel 2.4

Jumlah Alokasi Anggaran APBD II Tahun 2015 – 2019 Beserta Serapannya

No	Tahun Anggaran	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Porsentasi (%)
1	2015	28.368.988.476	26.373.665.374	92,97
2	2016	33.825.847.634	31.911.003.607	94,34

3	2017	66.973.207.826	59.908.084.067	89,45
4	2018	62.920.534.319	59.893.303.879	95,19
5	2019	56.577.878.372	53.103.411.985	94,64

Tabel 2.5
Jumlah Alokasi Anggaran APBN Tahun 2015 – 2019 Beserta Serapannya

No	Tahun Anggaran	Total Anggaran (Rp)	Ralisasi Anggaran (Rp)	Porsentasi (%)
1	2015	9.397.900.000	9.303.126.290	98,99
2	2016	6.721.875.000	6.477.590.000	96,37
3	2017	7.109.630.000	7.109.630.000	100
4	2018	-	8.55.075.000	99,89
5	2019	-	-	100

*Catatan :

- Tahun 2018 : total anggaran tidak diketahui dikarenakan ada beberapa paket APBN yang dalam bentuk transfer barang langsung.
- Tahun 2019 : kegiatan APBN dalam bentuk barang.

Tabel 2.5
Jumlah Alokasi Anggaran DAK Tahun 2015 – 2019 Beserta Serapannya

No	Tahun Anggaran	Total Anggaran (Rp)	Ralisasi Anggaran (Rp)	Porsentasi (%)
1	2015	17.347.740.000	16.072.193.150	92,65
2	2016	528.164.000	509.535.000	98,56
3	2017	3.233.488.000	3.204.541.000	99,10
4	2018	3.765.511.000	3.309.958.000	87,90
5	2019	470.765.770	467.370.000	99,99

Peningkatan alokasi anggaran berbanding lurus dengan serapan anggarannya, penyerapan anggaran rata-rata diatas 90 % dalam penyerapannya. dilaksanakan pada APBD perubahan di Bulan Agustus sehingga ada keterbatasan waktu dalam melaksanakan kegiatan dan penyerapan anggarannya. Kecermatan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indicator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan.

3. Sumber Daya Modal / Aset

Dinas Pertanian Kabupaten Balangan menempati kantor yang berlantai dua beralamat di Jl. A. Yani Km 4,5 Desa Gampa Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6

Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Yang Dimiliki Dinas Pertanian Kabupaten Balangan

No	Nama Barang	Banyaknya	Kondisi Barang	
			B	KB
1	AC Split	42	42	
2	Alat Digital Uji Logam Berat	1		
3	Alat Laboraturium	5		5
4	alat pertukangan	1		1
5	alat pengolah pakan ikan	1		1
6	Alat Seleksi Bibit	1		1
7	alat-alat kedokteran hewan	1		1
8	Almari/ Rak/ Buffet/ Filling Cabinet	136	123	13
9	Amplifier	2	2	
10	aquarium dan asesoris	1	1	
11	bak fiber kapasitas 1 ton	4	4	
12	Container Diplo	14	14	
13	cooper / penggiling hasil pertanian / pemotong rumput	1		
14	Cool Box	1		
15	Brankas	1		
16	CCTV	1		
17	Chlorine & Free Chlorine meter	1		1
18	fish finder	1		1



19	Drayer	1	1	
20	Dispenser	11	1	
21	DVD	1		
22	Faximile	1		
23	DO Meter	3	2	1
24	Gelas Ukus Set	1		
25	Foot Sealer	2		
No	Nama Barang	Banyaknya	Kondisi Barang	
			B	KB
26	Generator Set	8	8	
27	GPS	11	11	
28	Gerobak	1	1	
29	Handycam	2		
30	HI Blow	2		
31	Kamera	19	19	
32	Kendaraan Bermotor Roda Tiga	2	2	
33	Kipas Angin	2	2	
34	Kompor Gas	5	5	
35	Komputer PC	12	12	
36	Kulkas	9	9	
37	Kursi 12	12		
38	Laptop/ Notebook	75	75	
39	LCD Proyektor	6	6	
40	Meja	33		
41	Mesin Jahit Karung	1		
42	Mesin Hitung Uang	1		
43	Mesin Cuci	1		
44	Mesin Jahit Karung	1		
45	Mesin Ketik	12		
46	Mesin Pemotong Rumput	30		
47	Mesin Penghancur Kertas	7		
48	mesin pompa penyedot pupuk kandang cair	1		1
49	mesin penyaring/ayakan	1	1	
50	Mesin UPPO	1	1	
51	mesin pompa air	7	6	1
52	Microphone	12		
53	mist blower	3	3	
54	mikroskop + monitor + layar	3	1	2
55	Mixer	1	1	1
56	Mobil	10	9	1
57	moisture tester	3	2	1
58	Monitor	1	1	
59	Papan Baliho	1	1	
60	Papan Data SOTK	1	1	
61	Papan Data DUK	1	1	
62	Telepon/ Fax/ PABX	2	2	2



63	Penampungan Air	1	1	
64	pengambilan specimen	1	1	
65	peralatan rumah potong hewan	1	1	
66	pipa perbenihan	1	1	
67	Pendeteksi Kebuntingan	3	3	
68	PH Meter	1		1
69	pipa perbenihan	1	1	
70	Piring/ Gelas/ Mangkok/ Cangkir/ Sendok/ Garpu/ Pisau	1	1	
71	Power Tresher	2	2	
72	Power Supply	1	1	
No	Nama Barang	Banyaknya	Kondisi Barang	
			B	KB
73	Printer	79	69	10
74	Ranjang/ Tempat Tidur/Springbed/ Kasur	19	19	
75	Receiver	9	9	
76	Roda Ginset	1	1	
77	roda tabung o2	1		1
78	Roll Banner	1	1	
79	Sechi Disk	1		1
80	Seed Cleaner	1	1	
81	Sepeda	2	2	
82	Sepeda Motor	72	56	16
83	Server	1	1	
84	Siller Elektrik	1	1	
85	Sofa	11	1	
86	Speaker/ Sound System	8	8	
87	UPS/Stabilizer	8	8	
88	Tabung Gas	2	2	
89	Tabung O2 dan isi	2	2	
90	Tabung Pemadam Kebakaran	6	6	
91	Tandon Air	4	4	
92	Televisi	13	13	
93	Traktor Mini 13hp	1		1
94	Tongkat Ukur	1	1	
95	Timbangan Duduk	1	1	
96	Timbangan Elektrik	1	1	
97	Timbangan Duduk	1	1	
98	Teralis	1	1	
99	Tiang Besi/ Umbul-Umbul	1	1	
100	Vacum Cleaner	3	3	
101	USG Ternak	1	1	
102	Vacum Sealer	1	1	
103	Wireless	1	1	
104	White Board	1	1	

Tabel 2.7

Rekapitulasi Aset Lainnya Yang Dimiliki Dinas Pertanian Kabupaten Balangan

No	Nama Barang	Banyaknya	Kondisi Barang	
			B	KB
1	Alat Pengerus	2		2
2	Dispenser	6	6	
3	Gerobak	3	3	
4	Karpet/ hambal	10	10	
5	Ranjang/ Tempat Tidur/Springbed/ Kasur	7	4	3
6	Kipas Angin Gantung	9	9	
7	Kompur Gas	4	4	
No	Nama Barang	Banyaknya	Kondisi Barang	
			B	KB
8	Kursi	46	45	1
9	Meja	78	73	5
10	Mesin Pompa Air	1	1	
11	Microphone	2	2	
12	Papan SOTK	1	1	
13	Peralatan Dapur	1	1	
14	Plantonnet	1	1	
15	Printer	5	3	2
16	Timbangan Gantung	1	1	
17	Rak Piring	6	6	
18	Tabung Gas	4	4	
19	White Board	4	4	

Catatan : B : Baik KB : Kurang Baik

Dilihat dari tabel diatas sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersedia dalam jumlah dan kualitas memadai seperti kendaraan dinas maupun peralatan penunjang pekerjaan (komputer, scanner dll) dengan anggaran untuk pemeliharaan yang juga cukup memadai. Adapun barang yang sudah rusak berat sudah dilakukan usul penghapusan.

Permasalahan dalam pengelolaan barang berkaitan dengan inventarisasi asset adalah perubahan pada pemegang barang dan posisi barang yang berubah tempat tanpa sepengetahuan pengurus barang serta ketika penganggaran terjadi kesalahan dalam penempatan kode rekening, selain itu tidak adanya laporan kejelasan bantuan dari pusat/propinsi baik itu

tidak adanya laporan barang yang masuk pada pengurus barang, tidak adanya berita acara serah terima (asset) hibah dari pusat/propinsi ke daerah maupun nilai barang yang diterima sehingga pengelola barang sulit untuk mengadminstrasikannya dan daerah kesulitan dalam menganggarkan biaya pemeliharaan barang tersebut.

C. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SOPD

Sektor pertanian memegang peranan cukup penting dalam perekonomian nasional. Hal ini disebabkan karena sektor pertanian merupakan Resource Based yang mampu menyerap dan memperluas kesempatan usaha/lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Berdasarkan analisis faktor internal, eksternal, potensi dan permasalahan Dinas Pertanian Kabupaten Balangan dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan pertanian dan perkebunan lima tahun ke depan. Tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut :

- Keterbatasan lahan dan laju alih fungsi lahan yang tinggi menyebabkan berkurangnya lahan pertanian produktif,;
- Angka kemiskinan di Kabupaten Balangan masih cukup tinggi yang sebagian besar merupakan masyarakat petani;
- Kualitas SDM petani yang relatif masih rendah, membatasi kemampuan petani dalam penguasaan dan inovasi teknologi, sehingga sistem budidaya yang digunakan masih banyak yang tradisional;
- Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh petani masih perlu dibenahi/penambahan
- Rendahnya permodalan yang dimiliki petani, membatasi petani untuk membeli sarana produksi dan sarana pertanian;

- Kelembagaan petani (walaupun jumlahnya besar) kemampuannya relative masih rendah;
- Minat generasi muda terhadap pertanian relatif rendah
- Masih kurangnya petugas baik itu dikantor maupun dilapangan serta masih ada pejabat kepala seksi yang belum diisi.
- Rendahnya implementasi yang mencakup struktur organisasi, dokumentasi, pengendalian dan tanggap darurat
- Kurangnya pemeriksaan regular dan tindakan perbaikan yang mencakup pemantauan, pengukuran dan audit
- Kurangnya kajian tentang kesesuaian dan efektifitas sistem untuk mencapai tujuan dan perubahan yang terjadi didalam organisasi.
- Lokasi usaha budidaya hortikultura masih terpencar
- Skala usaha budidaya hortikultura masih sempit dan belum efisien.

Adapun peluang yang mendukung pembangunan Dinas Pertanian Kabupaten Balangan lima tahun ke depan antara lain :

- Adanya lahan yang potensial baik itu lahan tadah hujan, lahan kering maupun lahan lebak.
- Tingginya permintaan daging setiap tahun dari luar kabupaten.
- Kebutuhan penduduk akan bahan pangan (khususnya beras) terus meningkat, sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk;
- Perubahan pola makan dari kebutuhan nabati ke protein hewani.
- Adanya dukungan dari pihak luar baik itu swasta maupun pemerintah.
- Berkembangnya industri makanan olahan dengan bahan baku hasil tanaman pangan, menjadi peluang pasar yang potensial;
- Teknologi budidaya pertanian yang terus berkembang dan dikembangkan, baik untuk meningkatkan produktivitas maupun untuk meningkatkan mutu hasil pertanian tanaman pangan;



- Tingginya animo masyarakat-petani untuk meningkatkan kemampuannya dalam penguasaan teknologi dan penggunaan peralatan (sarana) pertanian modern untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha tani;
- Tersedianya dana pembangunan pertanian yang cukup memadai yang secara otonom dapat direncanakan dan diarahkan sesuai kebutuhan lokal;
- Adanya pengelolaan sumberdaya alam baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan tampungnya
- Mampu memberdayakan masyarakat dan kekuatan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan manusia serta lingkungan secara berlanjut.
- Tingginya kesadaran konsumen akan arti penting komoditas hortikultura yang mempunyai kontribusi kepada aspek kesehatan, estetika dan lingkungan
- Masyarakat yang makin kritis menjadi tantangan untuk selalu meningkatkan kualitas kinerja pelayanan bagi aparat Dinas;
- Dukungan Pemerintah Pusat yang cukup signifikan dalam bentuk pendanaan Dana Alokasi Khusus, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan APBN.



BAB V

PENUTUP

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci atas Pos-pos dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasioal (LO), Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Diharapkan catatan tersebut dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2019.

Paringin, Desember 2019,
Kepala Dinas Pertanian

RAHMADI, S.Pt.,MS
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19630908 198711 1 003